

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PROGRAM MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA (MOTEKAR) DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

Ade Irawan<sup>1)\*</sup>, Linda Mariana<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Pascasarjana, Universitas Pasundan

Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*adeirawan@unpas.ac.id*

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Pascasarjana, Universitas Pasundan

Bandung, Jawa Barat, Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui peran Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat keberhasilan implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya dalam memperkuat ketahanan keluarga di tengah tantangan sosial, ekonomi, budaya, dan perkembangan teknologi informasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam variabel utama, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik instansi pelaksana, komunikasi antarlembaga, sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan keluarga melalui MOTEKAR telah berjalan sesuai regulasi daerah dan program DP3AKB, khususnya dalam aspek pengasuhan anak dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, implementasi belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang belum efektif, serta variasi dukungan lingkungan pelaksanaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas MOTEKAR, peningkatan dukungan anggaran dan kelembagaan, serta perbaikan mekanisme koordinasi lintas pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas kebijakan ketahanan keluarga di Jawa Barat.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pembangunan Ketahanan Keluarga, Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR)

## ABSTRACT

*This study examines the implementation of family resilience development policies through the role of Family Resilience Motivators (MOTEKAR) implemented by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning (DP3AKB) of West Java Province. The objective of this study is to analyze the level of policy implementation and identify supporting and inhibiting factors in strengthening family resilience amid social, economic, cultural, and technological challenges. The study employs a qualitative approach with a descriptive method, referring to the Van Meter and Van Horn policy implementation model, which emphasizes six key variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication, implementers' dispositions, and the social, economic, and political environment.*



*Data were collected through observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings indicate that the implementation of family resilience policies through MOTEKAR has been carried out in accordance with regional regulations and DP3AKB programs, particularly in child caregiving and the prevention of domestic violence. However, the implementation has not been optimal due to limitations in resources, ineffective inter-agency coordination, and variations in environmental support. This study recommends strengthening the capacity of MOTEKAR, enhancing budgetary and institutional support, and improving cross-sectoral coordination mechanisms to increase the effectiveness of family resilience policies in West Java Province.*

**Keywords:** Policy Implementation, Family Resilience Development, and Family Resilience Motivators (MOTEKAR).

## PENDAHULUAN

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan isu strategis dalam kebijakan sosial kontemporer karena keluarga berperan sebagai unit dasar pembangunan manusia dan fondasi ketahanan sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, negara secara eksplisit menempatkan keluarga sebagai sasaran kebijakan melalui berbagai regulasi dan program pembangunan sosial. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga menegaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan kondisi dinamis yang ditandai oleh kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang dalam menghadapi tekanan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan (Kementerian PPPA, 2022). Regulasi ini mendefinisikan ketahanan keluarga melalui 29 indikator yang dikelompokkan ke dalam lima dimensi utama, yaitu landasan legalitas dan keutuhan keluarga, kesehatan fisik anggota keluarga, ketahanan ekonomi, ketahanan psikologis dan relasi intra-keluarga, serta ketahanan sosial budaya.

Secara global, literatur menunjukkan bahwa perubahan sosial yang cepat, globalisasi ekonomi, serta transformasi digital telah meningkatkan kompleksitas tantangan yang dihadapi keluarga. Studi internasional menegaskan bahwa krisis multidimensional, seperti pandemi COVID-19, memperbesar risiko kerentanan keluarga, mulai dari tekanan ekonomi, meningkatnya konflik domestik, hingga gangguan kesehatan mental (Prime et al., 2020; Lebow, 2020). Dalam situasi tersebut, konsep *family resilience* menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana keluarga mempertahankan fungsi dan kesejahteraannya melalui dukungan struktural, relasi sosial, dan intervensi kebijakan yang tepat (Walsh, 2020; Tetlow et al., 2024). Dengan demikian, penguatan ketahanan keluarga tidak dapat dilepaskan dari efektivitas implementasi kebijakan publik yang dirancang untuk mendukung keluarga.

Kebijakan ketahanan keluarga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dioperasionalisasikan melalui program-program berbasis komunitas. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR), yang dirancang sebagai strategi pemberdayaan masyarakat melalui kader yang berfungsi sebagai fasilitator, edukator, mediator, dan advokat keluarga. Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas keluarga dalam pengasuhan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta peningkatan kualitas relasi keluarga dan lingkungan sosial (Rahma et al., 2023; Kapti, 2023). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program berbasis kader sangat bergantung pada kualitas implementasi kebijakan, termasuk kejelasan tujuan, kecukupan sumber daya, dan efektivitas koordinasi lintas lembaga (Gayatri, 2022; Purnama, 2022).

Efektivitas implementasi kebijakan publik, model implementasi Van Meter dan Van Horn banyak digunakan dalam kajian kebijakan karena menekankan hubungan antara desain kebijakan dan realisasi di lapangan. Model ini mengidentifikasi enam variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarlembaga, disposisi atau sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Van Meter & Van Horn, 1975; diadaptasi dalam studi implementasi mutakhir oleh Mariana, 2024). Pendekatan ini relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan ketahanan keluarga karena program seperti MOTEKAR melibatkan banyak aktor dan beroperasi dalam konteks sosial yang beragam. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang secara aktif mengembangkan kebijakan ketahanan keluarga melalui pembentukan dan pengelolaan MOTEKAR oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). DP3AKB Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis karena bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan pembangunan ketahanan keluarga, serta menjadi instansi utama yang membina dan mengoordinasikan MOTEKAR di tingkat kabupaten dan kota (Mariana, 2024). Dengan jumlah penduduk yang besar dan karakteristik sosial ekonomi yang beragam, Jawa Barat menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji dinamika implementasi kebijakan ketahanan keluarga.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi program MOTEKAR di Jawa Barat telah menghasilkan capaian tertentu, khususnya dalam peningkatan pengetahuan keluarga mengenai pengasuhan anak dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Kapti, 2023; Rahma et al., 2023). Namun, temuan empiris juga mengungkap berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, ketimpangan distribusi MOTEKAR antar wilayah, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Purnama, 2022; Mariana, 2024). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik implementasi di lapangan. Dari perspektif akademik, sebagian besar kajian mengenai MOTEKAR masih bersifat deskriptif dan berfokus pada output kegiatan, seperti jumlah keluarga dampingan atau aktivitas sosialisasi program. Kajian yang mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan secara sistematis dengan kerangka teori yang mapan masih relatif terbatas. Padahal, literatur internasional menekankan pentingnya analisis kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk memastikan bahwa intervensi sosial benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga (OECD, 2021; Tetlow et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi untuk mengisi celah riset dengan mengkaji implementasi kebijakan ketahanan keluarga melalui MOTEKAR menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui program MOTEKAR, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan sosial, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi operasional bagi pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di Provinsi Jawa Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, proses, dan dinamika implementasi kebijakan yang tidak dapat direduksi menjadi angka semata, melainkan perlu dipahami dari perspektif aktor pelaksana kebijakan dan konteks sosial tempat kebijakan tersebut dijalankan (Creswell & Poth, 2021; Miles et al., 2020). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual bagaimana kebijakan MOTEKAR diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, serta bagaimana peran aktor-aktor pelaksana di lapangan dalam memperkuat ketahanan keluarga. Metode ini memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi langsung terhadap objek penelitian sehingga berbagai permasalahan implementasi dapat diidentifikasi secara komprehensif dan kontekstual (Sugiyono, 2021).

Penelitian berlokasi di DP3AKB Provinsi Jawa Barat, dipilih karena memiliki kewenangan strategis dalam perencanaan, pembinaan, dan pengoordinasian Program MOTEKAR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan relevansi dan kapasitasnya dalam memberikan informasi terkait implementasi kebijakan (Palinkas et al., 2020). Informan dibagi ke dalam dua kategori. Pertama, informan utama, yaitu Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, yang berperan sebagai sumber informasi kunci terkait kebijakan, perencanaan, dan mekanisme implementasi Program MOTEKAR. Kedua, informan pendukung, yang terdiri atas fasilitator dan Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) binaan DP3AKB Provinsi Jawa Barat. Informan pendukung berfungsi untuk memberikan perspektif operasional dan pengalaman lapangan sekaligus sebagai sumber triangulasi data guna meningkatkan validitas temuan penelitian (Flick, 2022).

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

1. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan variabel implementasi kebijakan dalam model Van Meter dan Van Horn. Wawancara bertujuan menggali informasi mengenai pemahaman kebijakan, pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan oleh pelaksana kebijakan (Creswell & Poth, 2021).
2. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pendampingan, koordinasi, dan pelaksanaan tugas MOTEKAR di lapangan. Observasi ini membantu peneliti memahami konteks implementasi kebijakan dan memverifikasi data hasil wawancara.
3. Studi dokumentasi meliputi analisis terhadap dokumen resmi seperti peraturan daerah, laporan kegiatan MOTEKAR, laporan monitoring dan evaluasi, serta dokumen perencanaan DP3AKB. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memperkuat data empiris dan memberikan gambaran kebijakan secara formal (Bowen, 2020).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan kontekstual proses implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui Program MOTEKAR.

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terlebih dahulu ditranskripsikan, kemudian direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan variabel implementasi kebijakan dalam model Van Meter dan Van Horn, meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antarlembaga, sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan analisis deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan membangun teori baru atau melakukan generalisasi, melainkan memberikan gambaran empiris yang utuh mengenai bagaimana kebijakan dijalankan dan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam konteks spesifik Provinsi Jawa Barat. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melalui *member check* kepada informan kunci untuk memastikan akurasi dan konsistensi temuan (Miles et al., 2020; Flick, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di Provinsi Jawa Barat telah berjalan secara administratif dan operasional, namun belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan rekapitulasi laporan bulanan MOTEKAR tahun 2021–2023, tercatat sebanyak 72.037 keluarga telah memperoleh pendampingan dengan capaian indikator kinerja pendampingan keluarga rentan sebesar 74%, melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 61%. Temuan ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, program MOTEKAR memiliki jangkauan yang luas dan berkontribusi terhadap pemenuhan target kinerja DP3AKB Provinsi Jawa Barat.

Data laporan menunjukkan permasalahan keluarga yang paling banyak ditangani oleh MOTEKAR berkaitan dengan legalitas keluarga (pembuatan akta lahir sebanyak 55.461 kasus dan akta nikah sebanyak 30.189 kasus), diikuti oleh masalah kesehatan fisik (31.742 kasus) dan ketahanan ekonomi keluarga (24.378 kasus). Sementara itu, pendampingan terkait kekerasan terhadap anak (2.393 kasus), kekerasan terhadap perempuan (2.153 kasus), dan perkawinan anak (6.000 kasus) menunjukkan bahwa MOTEKAR juga berperan dalam dimensi perlindungan dan ketahanan sosial-psikologis keluarga. Temuan ini mengindikasikan bahwa fokus kerja MOTEKAR mencakup beberapa dimensi utama ketahanan keluarga sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan nasional dan daerah (Kementerian PPPA, 2022).

Hasil wawancara dengan informan mengungkap bahwa capaian kuantitatif tersebut tidak selalu sejalan dengan kualitas implementasi di lapangan. Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa: “Secara regulasi dan perencanaan, program MOTEKAR sudah jelas. Tetapi di lapangan, tantangannya adalah keterbatasan jumlah motivator dan dukungan anggaran operasional, sehingga tidak semua kebutuhan keluarga bisa ditangani secara optimal.”

Adanya kesenjangan antara ukuran dan tujuan kebijakan dengan sumber daya yang tersedia, sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Meskipun tujuan kebijakan telah dirumuskan secara komprehensif dan target kinerja tercapai, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menghambat efektivitas implementasi. Dari sisi sumber daya kebijakan, penelitian menemukan bahwa jumlah MOTEKAR di Provinsi Jawa Barat sebanyak 666 orang yang tersebar di 27 kabupaten/kota belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah kecamatan. Seorang fasilitator MOTEKAR mengungkapkan: “Ada kecamatan yang sama sekali tidak memiliki MOTEKAR. Kami harus menangani wilayah yang luas dengan jumlah motivator yang terbatas, sehingga pendampingan tidak bisa dilakukan secara intensif.”



Kondisi ini diperparah oleh kebijakan kepegawaian daerah yang membatasi pengangkatan tenaga non-ASN, sehingga DP3AKB Provinsi Jawa Barat tidak dapat menambah jumlah MOTEKAR meskipun kebutuhan di lapangan masih tinggi. Faktor ini mencerminkan pengaruh lingkungan politik dan administratif eksternal terhadap implementasi kebijakan. Dari aspek komunikasi antarorganisasi, penelitian menemukan bahwa mekanisme koordinasi antara DP3AKB Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota belum berjalan optimal. Seorang MOTEKAR menyatakan: “Kami rutin melaporkan kegiatan ke provinsi, tetapi tindak lanjut di tingkat kabupaten/kota sering tidak jelas, terutama terkait dukungan anggaran dan program lanjutan.”

Meskipun terdapat saluran komunikasi formal seperti rapat koordinasi dan laporan bulanan, efektivitas komunikasi dalam mendukung implementasi kebijakan masih terbatas. Hal ini berdampak pada lemahnya sinergi lintas tingkat pemerintahan. Selain itu, faktor lingkungan sosial dan ekonomi juga memengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian menemukan bahwa tingkat kepedulian pemerintah kabupaten/kota terhadap pembangunan ketahanan keluarga masih bervariasi. Di beberapa daerah, belum terdapat alokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan MOTEKAR di desa atau kelurahan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam juga memengaruhi daya serap program dan keberlanjutan pendampingan keluarga.

Implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui Program MOTEKAR di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kunci dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, khususnya ukuran dan tujuan kebijakan serta sumber daya kebijakan. Dua variabel ini muncul sebagai faktor dominan yang menjelaskan mengapa capaian program secara administratif relatif tinggi, tetapi kualitas dan pemerataan implementasi di lapangan masih belum optimal. Model Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara tujuan kebijakan yang dirumuskan dan kapasitas sistem implementasi yang tersedia. Temuan penelitian ini memperkuat argumen tersebut, karena meskipun kebijakan ketahanan keluarga di Jawa Barat telah memiliki dasar regulasi yang kuat dan tujuan yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi keterbatasan struktural dan operasional.

### **1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Program MOTEKAR di Jawa Barat telah dirumuskan dengan tujuan yang jelas, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional serta peraturan daerah terkait ketahanan keluarga. Tujuan program mencakup penguatan legalitas keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta penguatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya keluarga. Kejelasan tujuan ini tercermin dalam indikator kinerja yang digunakan DP3AKB Provinsi Jawa Barat, seperti persentase pendampingan keluarga rentan dan jumlah keluarga yang memperoleh layanan (OECD, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan tujuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesesuaian ukuran kebijakan dengan kondisi empiris di lapangan. Capaian indikator kuantitatif seperti terpenuhinya target pendampingan keluarga rentan lebih merepresentasikan keberhasilan administratif daripada keberhasilan substantif dalam memperkuat ketahanan keluarga secara berkelanjutan. Hal ini terlihat dari masih dominannya pendampingan pada aspek legalitas dan administratif keluarga dibandingkan intervensi yang bersifat jangka panjang pada dimensi psikososial dan ekonomi keluarga (Hill & Hupe, 2021).

Pada perspektif Van Meter dan Van Horn, kondisi ini menunjukkan adanya potensi *goal displacement*, yaitu ketika ukuran keberhasilan kebijakan lebih menekankan pada pencapaian target numerik daripada kualitas dampak kebijakan. Oleh karena itu, ukuran dan tujuan kebijakan MOTEKAR perlu dievaluasi kembali agar tidak hanya berorientasi pada keluaran (output), tetapi juga pada hasil (outcome) dan dampak kebijakan terhadap ketahanan keluarga.

## **2. Sumber Daya Kebijakan**

Variabel sumber daya kebijakan menjadi faktor penghambat paling menonjol dalam implementasi Program MOTEKAR di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah MOTEKAR, tidak meratanya distribusi motivator antar kecamatan, serta ketiadaan anggaran operasional untuk pelaksanaan tugas lapangan berdampak langsung pada kualitas pendampingan keluarga. Temuan ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menempatkan sumber daya baik manusia, anggaran, maupun waktu sebagai prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan.

Kebijakan pembatasan pengangkatan tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan faktor lingkungan eksternal yang secara signifikan memengaruhi ketersediaan sumber daya manusia. Akibatnya, DP3AKB Provinsi Jawa Barat tidak memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan jumlah MOTEKAR dengan kebutuhan riil di lapangan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran yang hanya mencakup honorarium dan kegiatan koordinasi menyebabkan MOTEKAR tidak memiliki dukungan finansial yang memadai untuk melaksanakan fungsi pendampingan secara optimal di tingkat desa dan kelurahan (Walsh, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh komitmen pelaksana, tetapi juga oleh dukungan sistem fiskal dan kebijakan lintas sektor. Tanpa penguatan sumber daya kebijakan, tujuan besar pembangunan ketahanan keluarga berisiko tidak tercapai secara substansial, meskipun secara formal kebijakan telah dijalankan.

Implementasi kebijakan telah berjalan sesuai kerangka regulasi dan mencapai target kinerja yang ditetapkan, namun masih menghadapi kendala pada variabel kunci implementasi, terutama pada aspek ukuran dan tujuan kebijakan serta sumber daya kebijakan. Faktor lingkungan internal (kapasitas organisasi DP3AKB, sistem pembinaan MOTEKAR) dan lingkungan eksternal (kebijakan kepegawaian, dukungan pemerintah kabupaten/kota, dan kondisi sosial ekonomi wilayah) saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa evaluasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui MOTEKAR bersifat mendesak dan strategis, tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas program, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar mampu menjawab tantangan ketahanan keluarga yang semakin kompleks di tingkat lokal.

## **SIMPULAN**

Implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di Provinsi Jawa Barat telah berjalan sesuai kerangka regulasi dan perencanaan kebijakan yang ditetapkan. Secara administratif, program menunjukkan capaian kinerja yang relatif baik, tercermin dari terpenuhinya target pendampingan keluarga rentan dan luasnya jangkauan keluarga yang didampingi. Temuan ini menegaskan bahwa MOTEKAR berperan strategis sebagai ujung tombak implementasi kebijakan ketahanan keluarga, khususnya pada aspek legalitas keluarga, pengasuhan anak, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih bersifat parsial. Dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, ditemukan bahwa kesenjangan antara ukuran dan tujuan kebijakan dengan ketersediaan sumber daya menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian hasil kebijakan secara optimal dan berkelanjutan. Keterbatasan jumlah dan distribusi MOTEKAR, ketiadaan anggaran operasional untuk pelaksanaan tugas lapangan, serta belum meratanya dukungan pemerintah kabupaten/kota memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan, tetapi juga oleh kapasitas sistem implementasi dan dukungan lingkungan kebijakan. Dari lingkungan kebijakan, baik faktor internal maupun eksternal berpengaruh signifikan terhadap implementasi program. Faktor internal meliputi kapasitas kelembagaan DP3AKB Provinsi Jawa Barat dalam pembinaan dan koordinasi, sementara faktor eksternal mencakup kebijakan kepegawaian, kapasitas fiskal daerah, serta tingkat kepedulian pemerintah kabupaten/kota terhadap isu ketahanan keluarga. Kondisi ini menegaskan urgensi dilakukannya evaluasi kebijakan secara berkala agar desain dan implementasi program MOTEKAR dapat disesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan administratif yang berkembang.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian difokuskan pada aspek implementasi kebijakan di tingkat provinsi, sehingga belum menggambarkan secara mendalam variasi implementasi dan dampak program di tingkat desa dan keluarga sebagai penerima manfaat langsung. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan pemahaman proses, sehingga belum mengukur secara kuantitatif perubahan tingkat ketahanan keluarga sebagai dampak langsung intervensi MOTEKAR. Ketiga, analisis penelitian dibatasi pada tiga dimensi pembentuk indeks kualitas keluarga, sehingga belum mencakup seluruh dimensi ketahanan keluarga sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan nasional.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan pendekatan *mixed methods* yang mengombinasikan analisis kualitatif implementasi kebijakan dengan pengukuran kuantitatif dampak program terhadap indikator ketahanan keluarga. Penelitian selanjutnya juga perlu memperluas lokus hingga tingkat kabupaten/kota dan desa untuk menangkap variasi konteks implementasi dan praktik baik yang dapat direplikasi. Selain itu, kajian longitudinal diperlukan untuk menilai keberlanjutan dampak Program MOTEKAR serta efektivitas kebijakan penguatan ketahanan keluarga dalam jangka menengah dan panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, G. A. (2020). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 20(4), 302–314.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Flick, U. (2022). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Gayatri, M. (2022). Family resilience during the COVID-19 pandemic: A literature review. *Journal of Family Studies*, 28(4), 1234–1248.
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing public policy* (4th ed.). Sage Publications.
- Kapti, L. K. K. (2023). Efektivitas program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Janitra*, 5(2), 45–60.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga*.
- Lebow, J. L. (2020). Family in the age of COVID-19. *Family Process*, 59(2), 309–312.





- Mariana, L. (2024). *Implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui program MOTEKAR di Provinsi Jawa Barat* (Tesis). Universitas Pasundan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- OECD. (2021). *Building resilient societies: The role of families*. OECD Publishing.
- Palinkas, L. A., et al. (2020). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health*, 47(1), 6–16.
- Prime, H., Wade, M., & Browne, D. T. (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 pandemic. *American Psychologist*, 75(5), 631–643.
- Purnama, R. (2022). Implementasi program MOTEKAR sebagai strategi penguatan ketahanan keluarga. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 14(1), 77–92.
- Rahma, P., Argenti, G., & Atthahara, H. (2023). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui program MOTEKAR pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 413–427.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Tetlow, S., Wallace, C., Thomas, M., Filipponi, T., Pontin, D., & Livingstone, A. (2024). Family resilience interventions: A systematic review. *Public Health Nursing*, 41(2), 346–355.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (2021). The policy implementation process: A conceptual framework (revisited). *Policy Studies Journal*, 49(2), 456–472.
- Walsh, F. (2020). Loss and resilience in the time of COVID-19. *Family Process*, 59(3), 898–911.

